DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Achmad Chomzah, Hukum Pertanahaan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012)

Agus Budianto, Diktat Kuliah Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (Jakarta: 2021)

Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Bayumedia, 2005)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015)

_____, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Kencana, 2012)

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Cst Kansil, et.all, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: 2009)

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010)

Eddy Ruchiyat,. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPPA. (Bandung: Armico, 1989)

G. Kartasapoetra. 1986. Masalah Pertanahan di Indonesia (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986)

Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994)

Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Ekstitensi, Pengaturan dan Praktik, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2014)

Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah. (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Maria S.W Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008)

Putra Hutomo, *Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) Dalam Hukum Agraria Nasional Teori dan Praktik Dalam Hukum Agraria Nasional*, Cet. II (Bandung Barat : CV. Medika Pustaka Utama, 2022)

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim. Sendi-sendi Hukum Agraria, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1993)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012),

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suherman, Valuasi Ekonomi Penggunaan Lahan Sawah, (Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare, 2016)

Sukidin dan Basavi, Metode Penelitian Kualitatif Persektif Mikro, (Surabaya: Penerbbuat Iman Candika, 2022)

Soejono Soekanto & Sri Mamudhi, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007)

Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”,(Jakarta: Rineke Cipta,1998)

Tatang M Amirin , “Menyusun Rencana Penelitian”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010)

_____, perolehan Hak Atas Tanah, (Depok: Kencana)

Vigih hery Kristanto, "Metode Penetilitan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)", (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Yovita A Mangesti & Bernard L, Tanya Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)

B. JURNAL

Ardiansyah Zulhadji, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960" Lex Crimen. Vol.V/No. a/Aprl-Jun/2016

Auri, "Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 2, 2015.

Aryo Fajar Sunartomo, "Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember", JSEP Vol. 8 No. 2, 2015

Kusniati R, "Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan", *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.*6* No.2, 2013.

Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian hukum", Law Review, Volume V Nomor 3, Maret 2006.

Masrukhin, M, "Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan", *HERMENEUTIKA:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, 2019.

Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", Jurnal Yurstitia, Volume 19 No 2, Desember 2018.

Wahidatul Rizqi Firianti, "Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non- Pertanian", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No. 1, 2020.

Zulkarnain Anung Dwi Nugroho, "Keputusan Petani Beralih Fungsi Lahan Dari Persawahan ke Pembibitan Tanaman Buah", Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian, AGROMIX, Vol. 14, No. 1 2023

C. WEBSITE/INTERNET

Nasional Kontan "Kementrian ATR/BPN Tengah Proses Pembaruan Data Lahan Sawah yang Dilindungi" https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-tengah-proses-pembaruan-data-lahan-sawah-yang-dilindungi. Diakses pada 19 Juli 2024, hal 1.

Petunjuk Teknis "Verifikasi Data Lahan Sawah dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang dalam Rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi". https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/Juknis_TataCaraVerifDataLSDdgDataPTR_Publikasi.pdf. Diakses pada 19 juli 2024, hal. 4.

D. HASIL PENELITIAN

Rina Ekawati, "Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara", Tesis, Kalimantan Timur: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hal 13

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peratuan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84).

Peraturan Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).